



Pemerintah Kota Blitar

LKjIP

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR

2022



Kontak :

Jl. Trembesi No. 13 Kota Blitar
www.disperta.blitarkota.go.id
Telp./Fax. 0342-800104
disperta@blitarkota.go.id

 [dkpp.blitarkota](https://www.instagram.com/dkpp.blitarkota)

dkpp
KOTA BLITAR
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP yang kemudian menjadi bahan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya. LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Blitar, 8 Pebruari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BLITAR**



Ir. RODIYAH

Pembina Utama Muda
NIP. 19630610 199203 2 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama tahun 2022. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan tugas pada urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pangan, sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki 3 (tiga) rumusan tujuan dan 6 (enam) rumusan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan telah tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, serta dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Walaupun masih dalam situasi pemulihan pasca pandemic covid-19 namun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, capaian kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2022 memperoleh capaian di atas 100% (**Sangat Berhasil**) seperti pada tabel berikut :

<i>Tujuan</i>	<i>Indikator Tujuan</i>	<i>Target Capaian</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,18	74,57	100,53
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,7 (A)	85,56 (A)	101,02
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	196,82	200,34	101,02

Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2022 sebesar 74,57 atau mencapai 100,53% dari target daerah sebesar 74,18. IKP Kota Blitar berada pada Zona Hijau yang berarti Kota Blitar memiliki ketahanan pangan yang sangat baik. Sedangkan dalam tata kelola perangkat daerah Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 mendapat nilai 85,56 point masuk kategori A (**Memuaskan**) dan mencapai 101,02% dari target yang ditetapkan sebesar 84,70 point. Capaian ini meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar

84,69 point. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa ada perkembangan positif terutama pada Aspek Evaluasi Internal. Produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjukkan dengan nilai PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Tahun 2022 mencapai 200,34 milyar rupiah dan mencapai 101,02% dari target sebesar 196,82 milyar rupiah. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 201,80 milyar rupiah yang disebabkan penurunan produksi hasil peternakan karena terjadinya wabah Penyakit Mulut Dan Kuku.

Sedangkan untuk capaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	86,25	86,31	100,07
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,7	85,56	101,02
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura (kwintal)	198186,93	245151,00	123,70
Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan (kwintal)	84322,00	104984,48	124,50
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi (kwintal)	2404,80	2412,40	100,32
	Produksi hasil budidaya ikan hias (kwintal)	4698482,00	4699324,00	100,02
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan (kwintal)	30,6	79,35	259,31

Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2022 sebesar 86,31 point atau sebesar 100,07% dari target sebesar 86,25 point. Kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2022 mencapai 85,56 point atau mencapai 101,02% dari target daerah sebesar 84,7 point. Sedangkan untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 245.151 kwintal atau mencapai 123,70% dari target sebesar 198.186,93 kwintal. Capaian produksi hasil peternakan pada tahun 2022 sebesar 104.984,48 kwintal mencapai 124,50% dari target sebesar 84.322 kwintal. Indikator sasaran produksi hasil perikanan budidaya pada tahun 2022 untuk produksi hasil budidaya ikan konsumsi sebesar 2.412,40 kwintal mencapai 100,32% dari target sebesar 2.404,80 kwintal, produksi hasil ikan hias sebesar 4.699.482 ekor mencapai 100,02% dari target sebesar 4.698.482 ekor dan rata-rata nilai tambah produk hasil perikanan sebesar 79,35% mencapai 259,31% dari target sebesar 30,6%.

Blitar, 8 Februari 2023

EXECUTIVE SUMMARY

Government Agencies Performance Report (LKjIP) of the Blitar City Food and Agriculture Security Service for 2022 was prepared as a form of accountability for the implementation of activities and performance achieved by the Blitar City Food and Agriculture Security Service during 2022. In supporting the achievement of the vision and mission of Blitar City, the Blitar City Food and Agriculture Service Food and Agriculture carry out tasks on regional government affairs in the fields of Agriculture, Fishery, Livestock and Food, in accordance with Blitar Mayor Regulation Number 50 of 2022 concerning Main Duties, Functions and Work Procedures of the Blitar City Food and Agriculture Service. The Food Security and Agriculture Service has 3 (three) goal formulations and 6 (six) target formulations to be achieved within 5 (five) years and has been listed in the Food Security and Agriculture Service Strategic Plan Document for 2021-2026. Measuring the level of achievement of the performance of the Food Security and Agriculture Service in 2022 is carried out by comparing the target performance indicators with their realization, as well as compared to the achievements of the previous year. Even though it is still in a post-covid-19 pandemic recovery situation, based on the 2022 Performance Agreement, the achievement of the 2022 Food Security and Agriculture Agency's performance goals achieved above 100% (Very Successful) as in the following table :

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,18	74,57	100,53
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,7 (A)	85,56 (A)	101,02
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	196,82	200,34	101,02

The Blitar City Food Security Index for 2022 is 74.57 or reaches 100.53% of the regional target of 74.18. The Food Security Index (IKP) of Blitar City is in the Green Zone which means that Blitar City has very good food security. Meanwhile, in terms of governance of regional apparatus, the SAKIP score for the Food Security and Agriculture Service in 2022 scored 85.56 points in category A (Satisfactory) and reached 101.02% of the target set at 84.70 points. This achievement increased compared to the previous year, which was 84.69 points. From the evaluation results it was found that there were positive developments, especially in the Internal Evaluation Aspect. The productivity of agriculture and fisheries as indicated by the GRDP ADHB value for the Agriculture, Forestry and Fisheries Category in 2022 will

reach 200.34 billion rupiahs and reach 101.02% of the target of 196.82 billion rupiahs. This achievement has decreased compared to 2021, which was IDR 201.80 billion, due to a decrease in livestock production due to an outbreak of Mouth and Nail Disease.

Meanwhile, the target achievements of the Food Security and Agriculture Agency are as follows :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	86,25	86,31	100,07
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,7	85,56	101,02
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura (kwintal)	198186,93	245151,00	123,70
Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan (kwintal)	84322,00	104984,48	124,50
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi (kwintal)	2404,80	2412,40	100,32
	Produksi hasil budidaya ikan hias (kwintal)	4698482,00	4699324,00	100,02
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan (kwintal)	30,6	79,35	259,31

Realization of the 2022 Consumption PPH Score of 86.31 points or 100.07% of the target of 86.25 points. The performance of regional apparatus with the SAKIP Score indicator in 2022 reached 85.56 points or reached 101.02% of the regional target of 84.7 points. Meanwhile, the production of food crops and horticulture was 245,151 quintals or 123.70% of the target of 198,186.93 quintals. The achievement of livestock production in 2022 was 104,984.48 quintals, reaching 124.50% of the target of 84,322 quintals. Target indicators for aquaculture product production in 2022 for the production of consumption fish cultivation are 2,412.40 quintals reaching 100.32% of the target of 2,404.80 quintals, ornamental fish production of 4,699,482 reaching 100.02% of the target of 4,698,482 fish and the average added value of fishery products was 79.35%, reaching 259.31% of the target of 30.6%.

Blitar, 8 February 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-Aspek Strategis	7
F. Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	16
A.1 Analisa Capaian kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022.....	17
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya.....	32
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target s/d Akhir Renstra , Realisasi Nasional dan Daerah Sekitar	33
B. Akuntabilitas Keuangan / Cost Per Outcame.....	36
C. Prestasi/Penghargaan	40
BAB IV PENUTUP.....	41
LAMPIRAN	
a. Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026	
b. Rencana Kinerja Tahunan 2022	
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
d. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*) merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga diperlukan sistem pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dibuat melalui media pertanggungjawaban melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKjIP pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana serta sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka penerapan SAKIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi perencanaan pelaksanaan maupun hasil-hasilnya yang dilaporkan dalam bentuk LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi, memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibilitas*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- f. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- g. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota
- h. Koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- i. Pengembangan sarana prasarana pertanian
- j. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- k. Pembinaan produksi di bidang pertanian
- l. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
- m. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- n. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- o. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, katatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
- p. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja

- q. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
- r. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- s. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
- u. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- v. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
- w. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewenangan :

- a. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perencanaan operasional program ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan, di tingkat kota;
- d. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
- e. Bidang Peternakan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama satu Tahun 2022, dengan tujuan :

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Provinsi, Pusat maupun Masyarakat;
- 2) Memberikan informasi capaian sasaran pembangunan daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026);
- 3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang;
- 4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

D. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Sebagai unsur penunjang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki Aspek-aspek Strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan teknis dan pelaksana program urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksana pemberian rekomendasi izin serta pencabutan izin bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
3. Penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Pembina dan pendamping kelompok petani, peternak, pembudidaya ikan, pelaku usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 - 2026 Isu Strategis yang ditangani Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas (proses kegiatan agribisnis pertanian, peternakan dari hulu sampai hilir).
2. Belum optimalnya produktivitas perikanan dalam arti luas (proses kegiatan agribisnis perikanan dari hulu sampai hilir).
3. Keberagaman/diversifikasi konsumsi pangan masyarakat masih kurang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

KOTA BLITAR

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat**. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar sebagai salah satu pengampu indikator kinerja utama dari misi ke-3 yaitu “: **Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital**”.

Bagan 2.1.

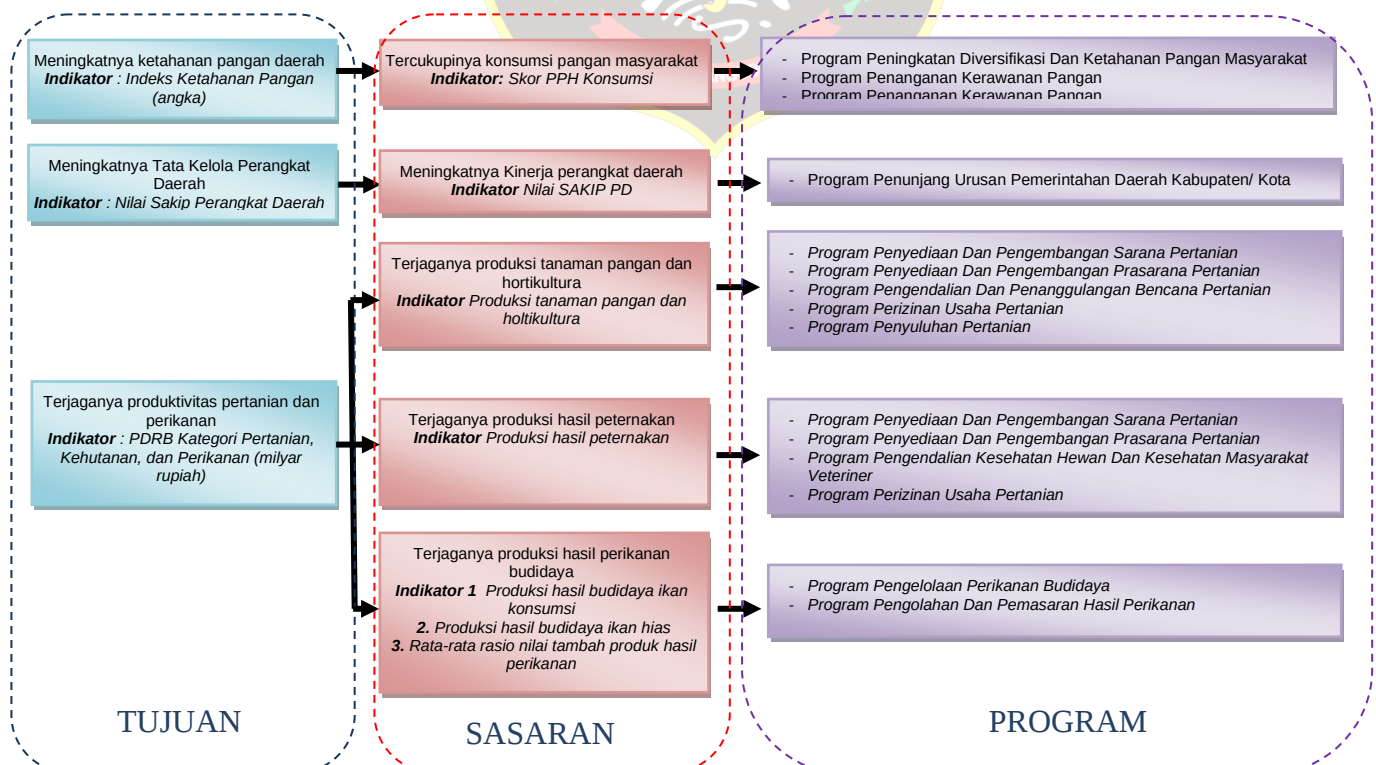
Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan RPJMD Kota Blitar



Berpedoman pada visi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Bagan 2.2

Matrik Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar



Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk pencapaian visi dan misi Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pada Renstra Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)			74,18	74,68	75,18	75,68	76,18
		Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,25	86,5	86,75	87	88,5
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah			84,7 (A)	84,71 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)
		Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,7 (A)	84,71 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)			196,82	197,81	198,8	199,79	200,79
		Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73
		Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	84321,66	84651,19	84827,72	85042,36	85356,3

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33
			Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	4.698.482	4.719.625	4.740.863	4.762.197	4.783.627
			Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	30,6	31,2	31,8	32,4	33

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Renstra Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	86,25	86,5	86,75	87	88,5
2	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Kwintal	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73
3	Jumlah produksi hasil peternakan	Kwintal	84.322	84.651	84.828	85.042	85.356
4	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33
5	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.698.482	4.719.626	4.740.864	4.762.198	4.783.628

Adapun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam “ Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026” .

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,25
2.	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A (84,7)
3.	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	198.186,93 kwintal
4.	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	84321,66 kwintal
5.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.404,80 kwintal
		Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.698.482 ekor
		Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	30,6

Sedangkan Rencana Kinerja (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021), serta realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

A.1 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2022

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

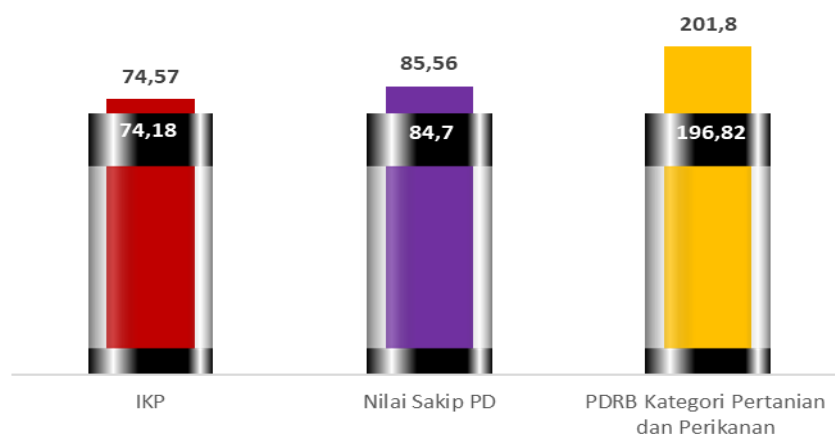
A.1.1 Tujuan

Capaian Kinerja Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian	Realisasi	%	Interpretasi Capaian
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,18	74,57	100,53	Sangat Berhasil. Kota Blitar masuk dalam kategori memiliki ketahanan pangan paling baik
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,7 (A)	85,56 (A)	101,02	Sangat Berhasil. Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja baik dan sangat akuntabel
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	196,82	200,34	101,02	Sangat Berhasil

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022



Tujuan Strategis : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

➤ Indikator Kinerja : Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan suatu sistem penilaian yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan yang terdiri dari sembilan indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang digunakan tersebut beserta bobot nilainya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Bobot Indikator Perhitungan IKP

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	-
Sub Total		-
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,125
Sub Total		0,45
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,08
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,18
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,08
8.	Persentase balita <i>stunting</i>	0,08
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,13
Sub Total		0,55

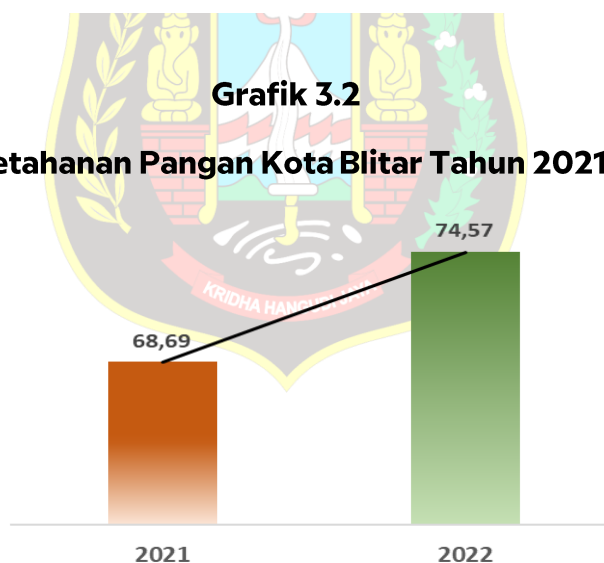
Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, karena ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Hasil dari analisis 9 indikator ini

menghasilkan nilai IKP yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok, dimana kelompok 1 adalah daerah yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari pada daerah dengan kelompok diatasnya. Sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan daerah yang memiliki ketahanan pangan paling baik. *Cut Off Point* IKP di sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.3
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$	$\leq 37,61$
2	$> 41,52 - 51,42$	$> 28,84 - 41,44$	$> 37,61 - 48,27$
3	$> 51,42 - 59,58$	$> 41,44 - 51,29$	$> 48,27 - 57,11$
4	$> 59,58 - 67,75$	$> 51,29 - 61,13$	$> 57,11 - 65,96$
5	$> 67,75 - 75,68$	$> 61,13 - 70,64$	$> 65,96 - 74,40$
6	$> 75,68$	$> 70,64$	$> 74,40$

Grafik 3.2
Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2021 - 2022



Capaian Indeks Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2022 sebesar 74,57 atau mencapai 100,53% dari target yang telah ditetapkan (Target : 74,18) dengan kategori **Sangat Berhasil**. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2022 meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 68,69. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan Kota Blitar masuk dalam Zona Hijau atau masuk

dalam kategori memiliki ketahanan pangan yang paling baik. Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar menduduki peringkat ke 57 dari 98 Kota di seluruh Indonesia.

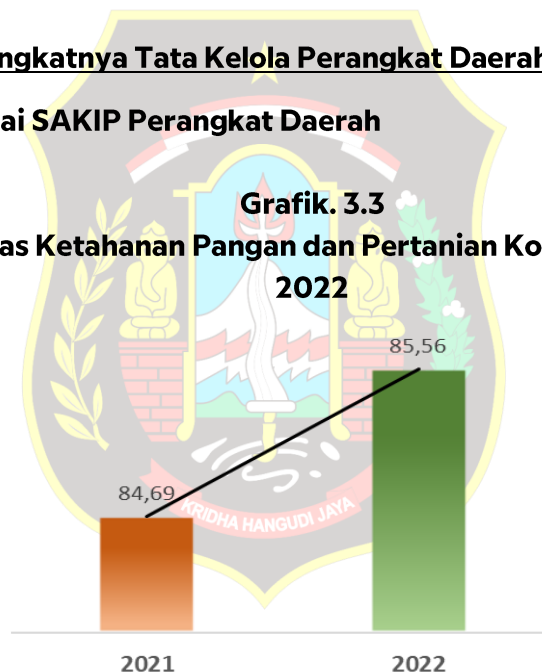
Pada tahun 2022 dilaksanakan Gerakan Serentak Tanam Cabe dan Umbi-Umbian serta pembinaan dan pemberian bantuan untuk P2L sebagai salah satu usaha penyediaan pangan tingkat rumah tangga. Selain itu juga diberikan bantuan bahan pangan kepada balita gizi kurang di Kota Blitar.

Terjadinya fluktuasi harga pangan terimbas inflasi tahun 2022 menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Sebagai antisipasinya dilakukan pemantauan harga pangan di pasar pemasok di Kota Blitar serta pemantauan secara rutin stok pangan di gudang toko grosir.

Tujuan Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

➤ Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Grafik. 3.3
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 - 2022



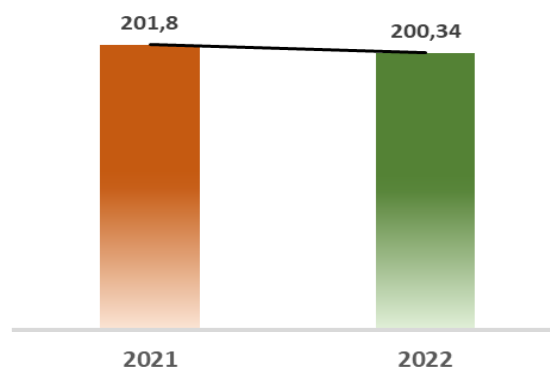
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah merupakan intregasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaopran kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Hasil evaluasi dari implemenetasi SAKIP Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan perdikat A (Memuaskan) dengan nilai 85,56 atau sebesar 101,02% dari target yang telah di ditetapkan dengan kayegori **Sangat Berhasil** (Target : 84,7). Angka ini naik dari capaian tahun sebelumnya yaitu 84,69.

Dari hasil evaluasi di dapatkan bahwa dalam perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar telah disusun dengan baik didukung dengan dokumen yang memadai serta memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (nilai 27,67). Dokumen perencanaan ini sudah digunakan untuk pengukuran kinerja serta penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Sedangkan dalam aspek pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara periodik dengan cara berjenjang sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan (nilai 22,80). Akan tetapi ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian yaitu dalam pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual serta kurangnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pentingnya pengukuran kinerja serta pemanfaatannya untuk perencanaan kedepan. Adanya aplikasi A-SAKIP belum mampu secara optimal meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengukuran kinerja pegawai. Untuk aspek Pelaporan Kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dipublikasikan (nilai 14,46). Dokumen pelaporan kinerja ini juga telah menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan kinerja berikutnya (nilai 20,63). Aspek Evaluasi Internal telah dilaksanakan dengan SDM yang memadai akan tetapi hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan Strategis : Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan

➤ **Indikator Kinerja : PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.**

Grafik 3.4
PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar
Tahun 2021 - 2022



Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor pertanian yang tumbuh dari suatu daerah. Dengan kata lain PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu waktu tertentu. Dalam menyusun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran yang menghasilkan komposisi data nilai tambah dirinci menurut lapangan usaha baik yang dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstans. Dalam pengukuran produktivitas pertanian dan perikanan digunakan indikator PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku sektor pertanian dan perikanan yang dapat menggambarkan kemampuan sumberdaya ekonomi sektor pertanian dan perikanan di Kota Blitar. Untuk Kota Blitar, PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung dari komponen produk primer dari sub sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian) dan sub sektor perikanan, dikarenakan Kota Blitar tidak memiliki hutan. Pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB untuk sektor pertanian dan perikanan adalah sebesar 200,34 milyar rupiah atau sebesar 101,02% dari target yang telah ditetapkan. Capaian PDRB ini menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 201,80 milyar rupiah. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan nilai produksi peternakan terutama hewan ruminansia mengalami penurunan. Selain itu curah hujan yang tinggi menurunkan kualitas dan produktivitas jagung karena harus dipanen muda untuk pakan ternak. Pada tahun 2022 juga terjadi penurunan jumlah dan jenis pupuk bersubsidi sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan dan pengadaan obat-obatan serta pelaksanaan vaksinasi PMK. Selain itu dilakukan pemantauan HPT lebih intensif serta menggiatkan petani untuk membuat pupuk secara mandiri melalui pelatihan dan pemberian bantuan pembuatan pupuk organik.

A.1.2 Sasaran Strategis / Perjanjian Kinerja

Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

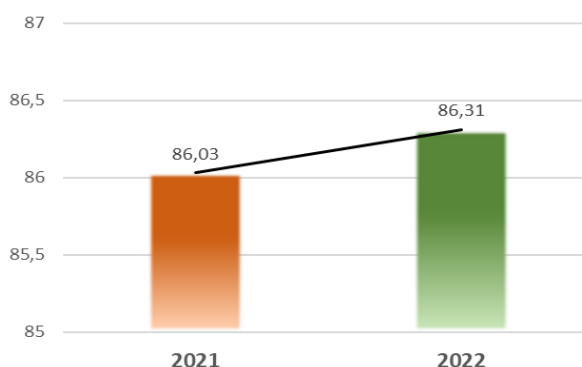
Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Blitar Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Inteprestasi Capaian
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	86,25	86,31	100,07	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,7	85,56	101,02	Sangat Berhasil
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	198186,93	245151,00	123,70	Sangat Berhasil
Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	84322,00	104984,48	124,50	Sangat Berhasil
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2404,80	2412,40	100,32	Sangat Berhasil
	Produksi hasil budidaya ikan hias	4698482,00	4699324,00	100,02	Sangat Berhasil
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	30,6	79,35	259,31	Sangat Berhasil

Sasaran 1 : Tercukupinya Konsumsi Pangan Masyarakat
Indikator Kinerja : Skor PPH Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan indikator mutu gizi dan keberagaman konsumsi pangan. Dengan pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk tidak hanya untuk dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Semakin tinggi nilai Skor PPH Konsumsi menunjukkan situasi konsumsi pangan yang semakin beragam, seimbang dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Diagram 3.5
Skor PPH Konsumsi Tahun 2021-2022



Skor PPH Konsumsi mengalami peningkatan dari 86,03 pada Tahun 2021 menjadi 86,31 pada tahun 2022 atau mencapai 100,07% dari target yang telah ditetapkan (Target daerah sebesar 86,25) dengan kategori **Sangat Berhasil**. Walaupun hanya mengalami sedikit kenaikan akan tetapi hal ini telah menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi pemulihan pasca pandemi dan inflasi bahan pangan yang terjadi, kebutuhan konsumsi masih dapat terpenuhi dan secara kualitas mengalami peningkatan. Penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dilakukan melalui pendekatan analisis konsumsi pangan. Analisis konsumsi pangan dilakukan melalui survey konsumsi pangan di 21 kelurahan untuk mengetahui pola konsumsi dan tingkat konsumsi energi masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 untuk mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan adalah pembinaan kWT pengelola P2L, Gerakan Tanam Umbi-Umbian, Gerakan Tanam Cabe, pemberian bahan makanan tambahan untuk balita gizi kurang, pelatihan diversifikasi pangan untuk pemenuhan pangan yang Beragam Bergizi Sehat Aman dan Halal (B2SAH).

Tabel. 3.5
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Blitar
Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor AKE	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	1,312	57.9	61.02	0.5	30.5	28.9	25.00	25.0	+
2.	Umbi-umbian	34	1.5	1.58	0.5	0.8	0.8	0.79	2.5	-
3.	Pangan Hewani	189	8.4	8.80	2.0	17.6	16.7	17.61	24.0	-
4.	Minyak dan Lemak	78	3.4	3.62	0.5	1.8	1.7	1.81	5.0	-
5.	Buah/biji berminyak	112	4.9	5.19	0.5	2.6	2.5	1.00	1.0	+
6.	Kacang-kacangan	372	16.4	17.28	2.0	34.6	32.8	10.00	10.0	+
7.	Gula	27	1.2	1.28	0.5	0.6	0.6	0.64	2.5	-
8.	Sayuran dan buah	127	5.6	5.89	5.0	29.5	28.0	29.47	30.0	-
9.	Lain-lain	16	0.7	0.75	-	-	-	0.00	-	
	Jumlah	2,266	100	105		118	112	86.31	100.0	

Sumber : Laporan Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2022

Keterangan:

(+) adalah kelompok bahan makanan yang mencapai skor PPH maksimum

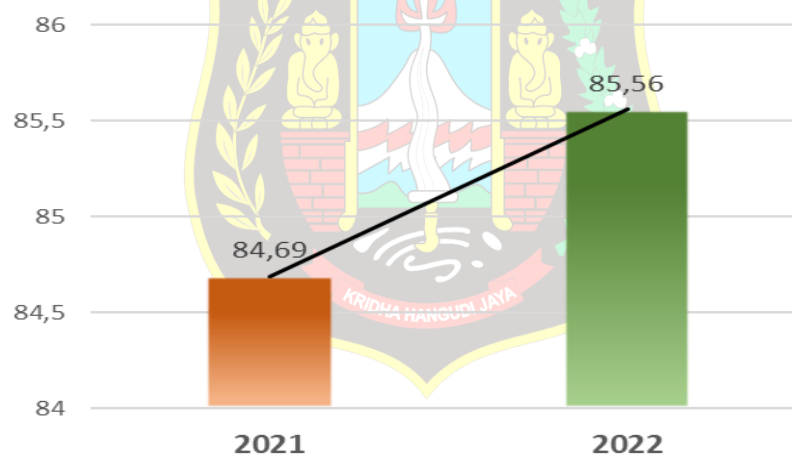
(-) adalah kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor PPH maksimum

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Nilai Sakip Perangkat Daerah

Penilaian Implementasi SAKIP pada perangkat daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan sehat. SAKIP merupakan salah satu area dalam reformasi birokrasi yang wajib di laksanakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan sesuai denagn tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil evaluai implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP, pada tahun tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memperoleh predikat Memuaskan (A) dengan nilai 85,56 dan mencapai 101,02% dari target yang telah ditetapkan (Target : 84,70). Hasil ini meningkat dibandingkan dengan perolehan nilai dari tahun 2021 yaitu 84,69 atau meningkat sebesar 1,03%.

Grafik 3.6
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2022

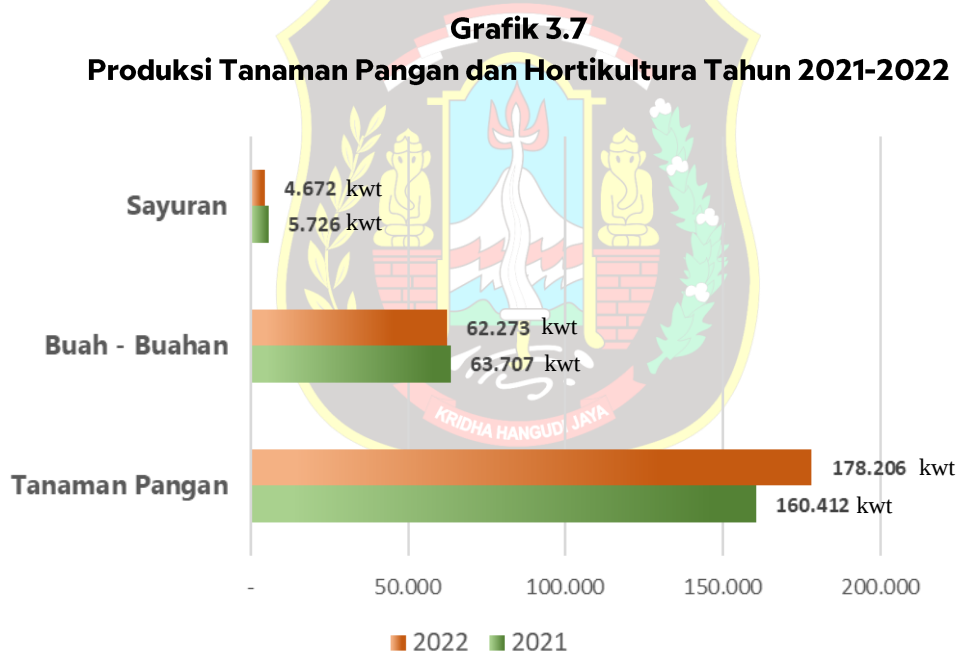


Sasaran 3 : Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura

Indikator Kinerja : Produksi tanaman pangan dan hortikultura

Sebagai daerah perkotaan, ketersediaan pangan di Kota Blitar lebih banyak didukung oleh perdagangan antar daerah disekitarnya. Akan tetapi walaupun bukan sebagai penyedia utama dalam pemenuhan ketersediaan pangan daerah, sub sektor tanaman pangan dan hortikultura tetap memegang peranan penting dalam pergerakan perekonomian di Kota Blitar. Selain itu untuk menjamin ketersediaan

pangan minimal seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, setiap daerah harus memiliki lahan abadi untuk produksi pangan berkelanjutan yang disebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Peningkatan produktivitas pertanian dapat dilihat dari kemampuan lahan memproduksi dalam 1 (satu) tahun. Jumlah produksi total yang dihasilkan berasal dari produksi tanaman dan hortikultura yang diusahakan dalam satu tahun. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2022 sebesar 245.151 kwintal atau sebesar 123,70% dari target yang telah ditetapkan (target : 198.186,93 kwintal). Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 5,73% di bandingkan pada tahun 2021 dimana jumlah produksi sebesar 231.866 kwintal. Produksi tanaman pangan dan hortikultura ini terdiri dari komoditas tanaman pangan, buah-buahan dan sayuran.



Produksi tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 9,99% dibandingkan dengan tahun 2022. Akan tetapi untuk produksi buah-buahan dan sayuran mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,30% dan 22,56% dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 lahan persawahan lebih banyak diusahakan untuk budidaya tanaman pangan dibandingkan dengan hortikultura. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan lebih banyak di usahakan dilahan

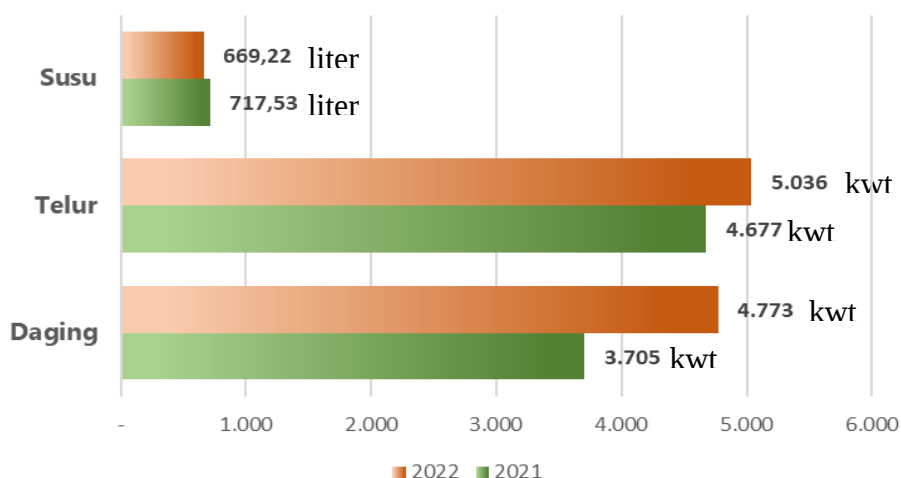
pekarangan. Penurunan produksi buah-buahan dikarenakan adanya pohon yang sudah dilakukan pemugaran. Untuk menjaga produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2022 telah dilakukan penyediaan prasarana pertanian berupa pembangunan/pemeliharaan JITUT, JUT dan juga Pintu Air. Selain itu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani secara rutin. Pada Tahun 2022 juga dilaksanakan pelatihan dan pemberian bantuan pembuatan pupuk organik dan budidaya padi sehat (PTPS) yang kedepannya akan dilaksanakan secara berkelanjutan selain sebagai tindak lanjut berkurangnya jumlah subsidi pupuk juga untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk pertanian berwawasan lingkungan.

Sasaran 4 : Terjaganya produksi hasil peternakan

Indikator Kinerja : Produksi hasil peternakan

Sub Sektor Peternakan memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung ketersediaan pangan terutama dalam penyediaan pangan yang berasal dari pangan hewani yang terdiri dari daging, susu dan telur. Pada tahun 2022 produksi hasil peternakan mencapai 104.984,84 kwintal atau sebesar 124,50% dari target sebesar 84.322 kwintal. Produksi hasil peternakan juga mengalami kenaikan sebesar 15,38% di bandingkan dari tahun tahun 2021 yang mencapai sebesar 90.994 kwintal.

Grafik 3.8
Produksi Hasil Peternakan Tahun 2021-2022



Terjaganya produksi hasil peternakan di dukung oleh 3 faktor yaitu peningkatan kesehatan hewan ternak, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan penjaminan kesehatan dan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) serta pembinaan dan pendampingan kelompok ternak. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pemberian layanan terpadu kesehatan hewan dengan optimalisasi pelapor kelurahan, pemberian KIE tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan sertifikasi NKV dan pengujian sampel produk hasil peternakan sebagai jaminan terhadap keamanan produk asal hewan. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah ternak untuk meminimalisir pencemaran lingkungan.

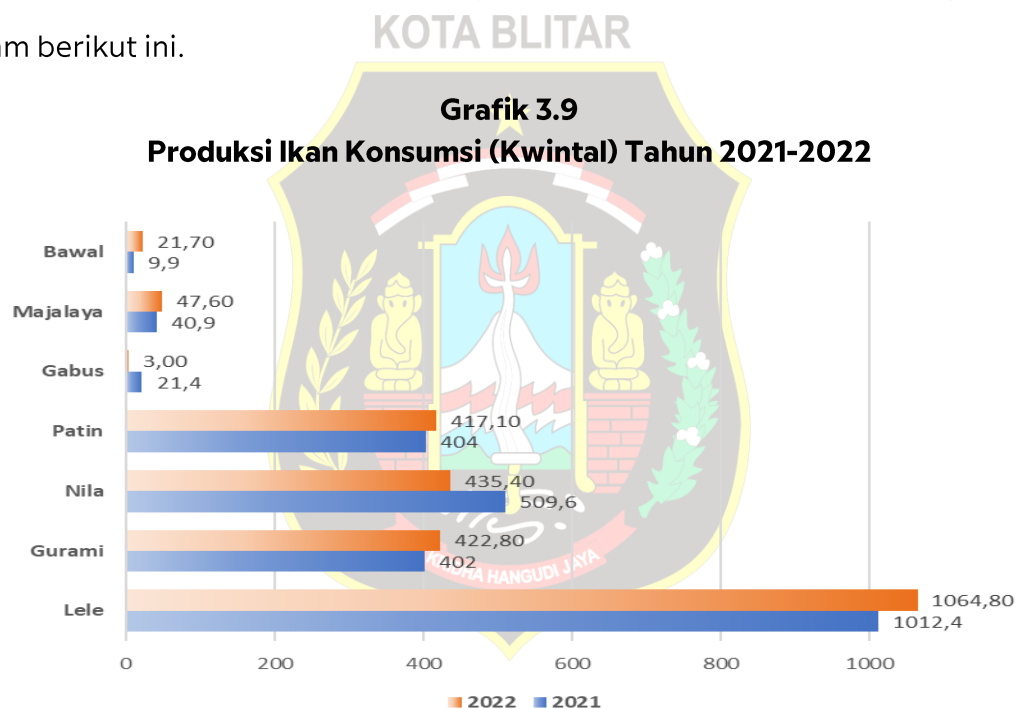
Produksi daging pada tahun 2022 sebesar 4.773 kwintal, mengalami peningkatan sebesar 28,83% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 3.705 kwintal. Produksi telur pada tahun 2022 mencapai 5.036 kwintal juga mengalami peningkatan sebesar 7,68% dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai sebesar 4.677 kwintal. Sedangkan untuk produksi susu mengalami penurunan sebesar 6,73% dari 717,53 liter pada tahun 2021 menjadi 669,22 liter pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya wabah PMK yang menyebabkan produktivitas sapi perah menjadi turun. Pelaksanaan vaksinasi dan pengadaan obat-obatan telah dilakukan sebagai upaya dalam penanganan wabah PMK.

Untuk mendukung stabilisasi produksi hasil peternakan, secara rutin Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan upaya baik preventif maupun kuratif. Kegiatan yang dilakukan berupa pelayanan terpadu kesehatan hewan, pembinaan kepada peternak tentang manajemen peternakan dan tekbologi budidaya serta pengawasan terhadap kesehatan masyarakat veteriner kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Selain itu adanya Pelapor Kelurahan (PelaKur) membantu dalam optimalisasi penyampaian informasi tentang peternakan serta penyampaian permintaan layanan kesehatan hewan dari peternak.

Sasaran 4 : Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya

Indikator Kinerja 1 : Produksi hasil budidaya ikan konsumsi

Sektor perikanan merupakan salah satu pendukung perekonomian di Kota Blitar selain sebagai penyedia bahan pangan hewani. Komoditas perikanan yang diusahakan merupakan budidaya ikan konsumsi. Pada tahun 2022 produksi ikan konsumsi mencapai 2.412,40 kwintal atau mencapai 100,32% dari target sebesar 2.404,80 kwintal. Produksi ikan konsumsi juga mengalami kenaikan sebesar 0,51% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 2.400,20 kwintal. Jumlah produksi ikan konsumsi berdasarkan jenisnya pada tahun 2022 disajikan pada diagram berikut ini.



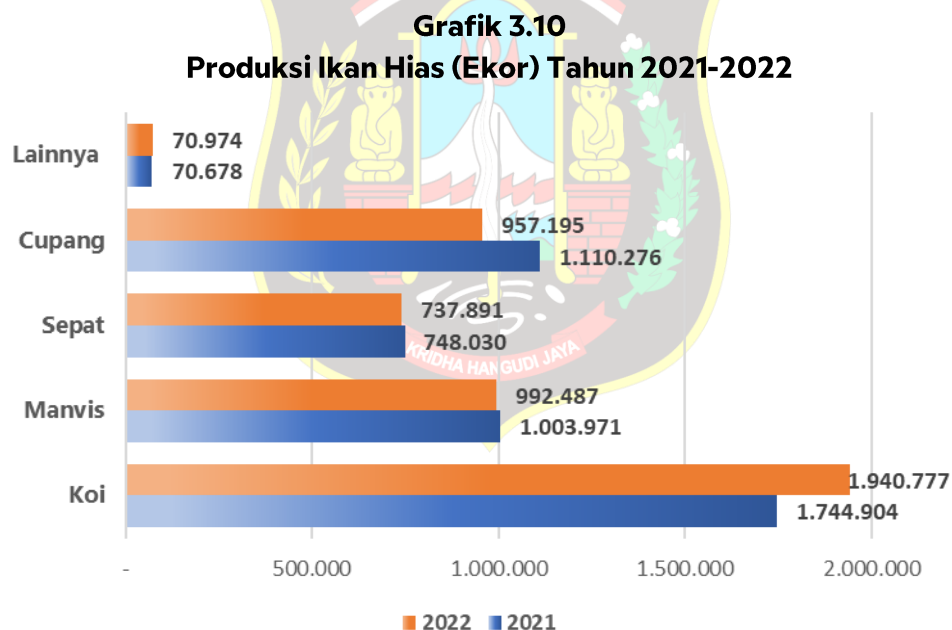
Komoditas ikan lele memberikan kontribusi paling besar pada produksi ikan konsumsi yang kemudian diikuti dengan komoditas lainnya seperti gurami, nila, patin dan lainnya. Walaupun begitu setiap tahunnya preferensi jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan mengalami perubahan tergantung terhadap permintaan pasar.

Pembudidaya ikan di Kota Blitar pada tahun 2022 sejumlah 395 orang dan sebanyak 31,65% telah mendapatkan pelatihan/pendampingan. Pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan budidaya ikan nila bioflok, budidaya ikan dalam ember dan pelatihan peningkatan mutu usaha perikanan. Selain itu juga dilaksanakan

pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (CPIB dan CBIB). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi perikanan sehingga mampu memberikan nilai tambah perekonomian bagi pembudiaya.

Indikator Kinerja 2 : Produksi hasil budidaya ikan hias

Selain menghasilkan bermacam komoditas ikan konsumsi, Kota Blitar juga dikenal sebagai penghasil ikan hias. Selain jenis Ikan Koi ada beberapa jenis ikan hias lainnya yang dibudidayakan di Kota Blitar. Budidaya ikan hias mampu memberikan kontribusi yang bagus untuk pergerakan perekonomian di Kota Blitar. Pada tahun 2022 jumlah produksi ikan hias mencapai 4.699.324 ekor, mencapai 100,02% dari target sebesar 4.698.482 ekor. Produksi ikan hias pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,46% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai sebesar 4.677.859 ekor.



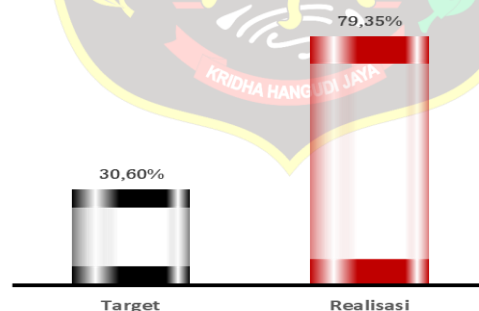
Komoditas ikan hias yang dibudidayakan paling banyak dari jenis koi, manvis, cupang, sepat dan sebagainya kecil dari jenis guppy, goldenblack, chana dan mas koki. Seperti pada budidaya ikan konsumsi, preferensi jenis ikan pada budidaya ikan hias juga tergantung permintaan pasar. Jumlah produksi budidaya ikan hias berdasarkan jenisnya pada tahun 2022 dapat dilihat pada diagram berikut ini

Jumlah pembudidaya ikan hias di Kota Blitar sebanyak 98 pembudiaya. Selain pembinaan dan pendampingan secara rutin kepada pembudiaya ikan hias, untuk meningkatkan produksi dan jangkauan pemasaran pada tahun 2022 juga dilaksanakan promosi ikan hias yang dikemas dalam bentuk Bursa Ikan Hias Plus Kota Blitar dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pengiat dan komunitas ikan hias di Kota Blitar.

Indikator Kinerja 3 : Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan

Nilai tambah atau *value added* adalah nilai ekonomi yang ditambahkan ke suatu produk sehingga produk tersebut lebih berkualitas dan bisa meningkatkan harga. Rasio nilai tambah produk perikanan menggambarkan pertambahan nilai pada suatu produk perikanan sebelum dan sesudah mendapat suatu perlakuan khusus yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Proses penambahan nilai produk perikanan bisa berupa perlakuan seperti pengolahan dan pengemasan. Penghitungan rasio nilai tambah ini menggunakan metode Hayami yaitu memperkirakan perubahan nilai per kilogram bahan baku setelah mendapatkan perlakuan.

Grafik 3.11
Rata-rata Rasio Nilai Tambah Produk Perikanan Tahun 2022



Pada tahun 2022 rata – rata rasio nilai tambah produk perikanan sebesar 79,35% atau mencapai 259,31%. Adanya pendampingan dan pelatihan olahan produk perikanan terbukti mampu memberikan nilai tambah untuk produk perikanan. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pembinaan dan pelatihan produk hasil perikanan kepada kelompok pengolah hasil perikanan. Selain itu juga dilakukan pemantauan dan pembinaan kepada kelompok pemasar perikanan.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel. 3.6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	
			2022	2021
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,18	74,57	68,69
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,7 (A)	85,56 (A)	84,69
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	196,82	200,34	201,8
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,7	85,56	84,69
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	86,25	86,31	86,03
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	198186,93	245151,00	231.866
Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	84322,00	104984,48	90.994
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.404,80	2412,40	2.400,20
	Produksi hasil budidaya ikan hias	4698482,00	4699324,00	4.677.859
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	30,6	79,35	N/A

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target S/D Akhir Periode Renstra , Target Nasional Dan Daerah Sekitar

Tabel. 3.7

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RENSTRA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d 2026	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	76,18	74,57	97,89
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,77	85,56	100,93
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	200,79	200,34	99,78
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,77	85,56	100,93
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	88,50	86,31	97,53
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	198.563,73	245151,00	123,46
Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	85.356,30	104984,48	123,00
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.549,33	2412,40	94,63
	Produksi hasil budidaya ikan hias	4.783.627,00	4699324,00	98,24
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	33	79,35	240,45

Dari tabel diatas terlihat bahwa target akhir Renstra telah terpenuhi dengan capaian diatas 90%. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sampai tahun 2022 mencapai 97,89%, Nilai Sakip mencapai 100,93%, PDRBKategori Pertanian, Perkebunan dan Perikanan mencapai 99,78%, Skor PPH Konsumsi mencapai 97,53%, produksi tanaman pangan dan hortikultura mencapai 123,46%, produksi hasil peternakan mencapai 123%, produksi budidaya ikan konsumsi mencapai 94,63%, produksi hasil budidaya ikan mencapai 98,24% dan rata-rata nilai tambah produk hasil perikanan mencapai 240,45%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel. 3.8

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL DAN DAERAH SEKITAR

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional Tahun 2022	Realisasi Daerah Sekitar				Keterangan
				Kota Malang	Kota Madiun	Kota Kediri	Kota Pasuruan	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,57	60,2	80,80	85,32	73,95	71,21	Laporan IKP Tahun 2022 Badan Pangan Nasional
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,56 (A)	-	-	-	-	-	Tidak ada data
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	200,34	-	211,80	110,35	356,81	213,93	Sumber BPS

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diatas capaian nasional yaitu sebesar 60,20. Sedangkan dibandingkan dengan beberapa daerah di Jawa Timur, capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Blitar juga masih dibawah capaian dari Kota malang, Kota Madiun dan diatas dari Kota Kediri dan Kota Pasuruan. Untuk PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga masih berada di bawah dari capaian Kota Malang, Kota Kediri, Kota Pasuruan tapi masih diatas capaian Kota Madiun.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN / COST PER OUTCOME

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan per tujuan dan/atau sasaran yang menjadi kinerja utama (*cost per outcome*). Sedangkan untuk pengambilan kesimpulan dalam penghitungan akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rasio Ekonomi}}$$

Bila Rasio Efisiensi > 1 maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya EFISIEN. Sebaliknya, bila Rasio Efisiensi < 1 maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya TIDAK EFISIEN.

B.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel. 3.9
ALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	9.009.650.737	50,86
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	804.319.860	4,54
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan holtikultura	5.562.501.112	31,40
		Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	1.511.280.554	8,53
		Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	827.685.195	4,67
			Produksi hasil budidaya ikan hias		
			Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan		
		JUMLAH			

Secara keseluruhan alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 17.715437.458. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk tujuan meningkatnya tata kelola perangkat daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah adalah sebesar Rp. 9.009.650.737,00 atau sebesar 50,86%, tujuan meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan sasaran tercukupinya konsumsi pangan masyarakat adalah sebesar Rp. 804.319.860 atau 4,54% sedangkan anggaran untuk tujuan terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan dengan sasaran terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 5.562.501.122 atau sebesar 31,40%, terjaganya produksi hasil peternakan sebesar Rp. 1.511.280.554 atau 8,53% dan terjaganya produksi hasil perikanan budidaya sebesar 827.685.195 atau 4,67% dari total anggaran yang tersedia.

B.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Tabel. 3.10

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Tujuan	Indkator Tujuan	Target	realisasi	% Capaian	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran		
										Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,7 (A)	85,56 (A)	101,02	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,7	85,56	101,02	9.009.650.737,00	8.790.072.728,00	97,56
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,18	74,57	100,53	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	86,25	86,31	100,07	804.319.860,00	801.920.360,00	99,70
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	196,82	200,34	101,02	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan holtikultura	198186,93	245151,00	123,70	5.562.501.112,00	5.501.147.229,43	98,90
					Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	84322,00	104984,48	124,50	1.511.280.554,00	1.490.446.100,00	98,62
					Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2404,80	2412,40	100,32	827.685.195,00	826.593.850,00	99,87
						Produksi hasil budidaya ikan hias	4698482,00	4699324,00	100,02			
						Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	30,6	79,35	259,31			
JUMLAH										17.715.437.458,00	17.410.180.267,43	98,28

Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.410.180.267,43 atau sebesar 98,28% dari pagu anaggaran sebesar Rp. 17.715.437.458,00. Dana tersebut digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022.

B.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 3.11

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
KINERJA TUJUAN TAHUN ANGGARAN 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	101,02	97,56	1,04	Efisien
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	100,53	99,70	1,01	Efisien
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	101,02	98,95	1,02	Efisien

Tabel. 3.12

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
KINERJA SASARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	101,02	97,56	1,04	Efisien
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	100,07	99,70	1,00	Efisien
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	123,70	98,90	1,25	Efisien
Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	124,50	98,62	1,26	Efisien
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	100,32	99,87	1,00	Efisien
	Produksi hasil budidaya ikan hias	100,02			
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	259,31			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja utama dan sasaran strategis rata-rata diatas 1. Semakin tinggi rasio efisiensi berarti semakin efisien dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja yang telah ditentukan. Untuk tujuan meningkatnya tata kelola perangkat daerah rasio efisiensi sebesar 1,04 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 101,02% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 97,56% dan dikategorikan EFISIEN. Untuk tujuan meningkatnya ketahanan pangan daerah rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,07% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,70% dan dikategorikan EFISIEN. Sedangkan untuk mencapai tujuan terjaganya produktifitas pertanian dan perikanan mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,02 dan di kategorikan EFISIEN.

Untuk tingkat efisiensi pencapaian kinerja sasaran rata-rata rasio efisiensi diatas 1. Rasio efisiensi untuk sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah mencapai 1,04, tercukupinya konsumsi pangan mencapai 1,00, terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 1,25, terjaganya produksi hasil peternakan sebesar 1,26 dan terjaganya produksi hasil perikanan budidaya sebesar 1,00.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

1. Nilai Sakip OPD Tahun 2022 Peringkat Ke-7 dengan Predikat A (Memuaskan) dengan nilai 85,56
2. Peringkat III Dinas Kab/Kota Teraktif Dalam Pengawasan Obat Di Propinsi Jawa Timur
3. Peringkat 5 Kota Dengan Predikat Zero Recorted Case PMK
4. Juara 1 Kategori Menu Kudapan Lomba Masak Ikan Tingkat Propinsi 2022

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2022.

A. KESIMPULAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disusun berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar 2021-2026, dokumen Renja 2022, serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dalam laporan ini mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan Tujuan Renstra yang telah ditetapkan menjadi Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, yang terdiri atas tujuan dan sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis masuk dalam kategori **Sangat berhasil**. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dari hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu perlunya upaya yang lebih efektif dan efisien dalam penjaminan ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan /atau sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan lebih difokuskan pada peningkatan daya dukung / kapasitas lahan pertanian dengan penyediaan prasarana, penggunaan pupuk organik dan penerapan pola tanam padi sehat (PTPS).
2. Pengendalian alih fungsi lahan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
3. Peningkatan kualitas, nilai tambah produk perikanan serta memperluas jangkauan pemasaran dengan pelatihan dan pendampingan serta memanfaatkan platform digital sehingga mempermudah ketersediaan dan keragaman produk hasil perikanan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, meningkatkan keuntungan ekonomi serta lebih memasyarakatkan macam produk hasil olahan perikanan
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani baik sektor pertanian, perikanan dan peternakan dalam manajemen budidaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta daya saing di pasaran.

Demikian, semoga dokumen LKjIP ini dapat berguna bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.

Blitar, 8 Pebruari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BLITAR



Ir. RODIYAH

Pembina Utama Muda

NIP 19630610 199203 2 008

LAMPIRAN 1.

Matrik Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat
Misi : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.	73,38	74,18	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	85,25	86,25	Peningkatan pembangunan bidang ketahanan pangan	Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan	Urusan Pangan
											Optimalisasi pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,92	84,7	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,92	84,7	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah berbasis kinerja	Urusan Pangan
											Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutan an, dan Perikanan (milyar rupiah)	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	195,65	196,82	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	197.890	198.186,93	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Urusan Pertanian
											Peningkatan pengendalian Organisme pengganggu tanaman OPT	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
											Peningkatan ketersediaan sarana pertanian Peningkatan kapasitas SDM petani Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura secara digital	
					Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	83.818	84321,66	Peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
					Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2310,3	2.404,80	Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan	Urusan Perikanan
						Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.563.416	4.698.482,45		Peningkatan pemenuhan benih ikan	
						Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata ((nilai output (Rp/Kg)- Sumbangan input lain (Rp/kg)- Harga bahan baku (Rp/kg))/ Nilai output x 100%)	-	30,6		Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital	

Blitar, 3 Januari 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR


I. RODIYAH
Pembina Utama Muda
NIP 19630610 199203 2 008

LAMPIRAN 2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,75 angka	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	104.758.400
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	9.642.000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8 dokumen	95.116.400
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	6.229.810.023
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	58 pegawai	6.227.154.823
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2 dokumen	2.655.200
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	77.945.350
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	3 event	77.945.350
							Jumlah publikasi kegiatan dinas di media cetak	2 publikasi	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.742.487.440

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	13 Jenis	9.206.500
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 Unit	272.472.300
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	49 jenis	106.300.840
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	554 dos	1.120.478.800
							Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	45 jenis	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 jenis	33.201.200
							Jumlah lembar penggandaan	16650 lembar	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	14.280.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	82 rakor	186.547.800
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	159.918.604
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	18 rekening	159.918.604
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	694.730.920
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	41 unit	147.008.700
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	37 unit	21.022.300
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit	487.712.720
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	73 unit	38.987.200

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,25	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka konsumsi energi per kapita Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	1971 (kkal/ kap/ hari)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	84 Angka	22.281.000
					2200 (kkal/ kap/ hari)	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersedia	1 dokumen	2.820.400
							Jumlah dokumen pendataan cadangan pangan	1 dokumen	
							Jumlah laporan pemantauan harga pangan	12 Dokumen	
						Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Frekuensi fasilitasi pasar tani	6 kali	19.460.600
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein (gr/kapita/ tahun)	57 (gr/ kapita/ hari)	706.957.360
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok Peserta pemberdayaan pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	75 kelompok	654.850.460
							Jumlah partisipasi keg. Lomba Cipta Menu/kreasi masakan tingkat regional	1 orang	
							Jumlah Pelaksanaan Lomba KRPL	1 kali	
							Jumlah Peserta Penyuluhan Pangan B2SAHintroduksi pangan alternatif	24 orang	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan yang tersusun	1 dokumen	52.106.900
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	13,17 %	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2 Kali	63.081.500

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar (%)	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) yang tersusun	12 dokumen	63.081.500
							Jumlah penerima tambahan gizi untuk balita gizi kurang	135 anak	
						Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	33 %	12.000.000
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pengujian pangan segar	15 sampel	12.000.000
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal) Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	2.404,80 4.698.482	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	1,59 % 14,35 %	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan	26,71 %	105.467.890
						Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah jenis promosi pemasaran ikan hias	2 jenis	70.983.100
						Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan/bimtek peningkatan mutu usaha budidaya perikanan	30 orang	34.484.790
							Jumlah peserta pelatihan/bimtek budidaya ikan	60 orang	
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	0,89 %	599.575.005
						Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan perikanan	1 dokumen	5.515.000

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Rata-Rata Ratio nilai tambah produk hasil perikanan	31	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)	33891 juta rupiah	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana dan prasarana perikanan yang tersedia	7 jenis	552.597.005
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan keskanling	12 lokasi	23.663.200
						Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya perikanan	100 orang	17.799.800
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha perikanan yang menghasilkan produk layak dipasarkan	8,7 %	41.627.200
						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang dibina	10 kelompok	41.627.200
							Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek Pemasaran Hasil Perikanan	30 orang	
							Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek Pengolahan Hasil Perikanan	60 orang	
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Konsumsi Ikan	18 kg/kap/tahun	81.015.100
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi lomba masak ikan tk. Regional	1 orang	81.015.100
							Jumlah jenis sosialisasi gerakan makan ikan	2 jenis	
							Jumlah jenis promosi pemasaran produk olahan hasil ikan	1 jenis	
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	198.186,93	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia	71 %	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	20 %	400.123.125

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah dokumen RDKK yang disusun	21 dokumen	85.884.900
							Jumlah pelaksanaan pengawasan, verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi pertanian.	12 kali	
							Jumlah poktan tanaman pangan horti yang dimonev ketersediaan sarana pendukung pertanian	14 poktan	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah penyediaan sarana operasional Kebun Edukasi Pertanian.	2 jenis	314.238.225
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	50,88 %	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	75 %	158.085.400
						Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen persiapan LP2B	1 dokumen	76.609.900
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah peserta rakor mutasi lahan pertanian	30 orang	81.475.500
							Jumlah peserta rakor/ sosialisasi Persiapan LP2B Kota Blitar	30 orang	
						Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	69,18 %	3.428.643.387
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang JITU yang terbangun dan terpelihara	450 meter	1.626.553.800
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang JUT yang terbangun dan terpelihara	500 meter	1.508.378.500
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang terbangun dan terpelihara	8 unit	235.962.500
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah sarana & prasarana Balai Penyuluhan kecamatan yang tersdia dan terpelihara (pendamping DAK/ DAU	1 jenis	57.748.587
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100 %	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	6,67 %	91.487.000

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah penyediaan bahan pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 jenis	91.487.000
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	25 %	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Memenuhi Standar Teknis	10 unit	68.043.500
						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pendampingan usaha pertanian	5 pelaku usaha	68.043.500
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	0,93 % 4,76 % 22,22 %	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	30 %	1.416.118.700
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian yang tersusun	25 dokumen	76.212.500
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen penilaian kelas kelompok tani	1 dokumen	1.334.923.500
							Jumlah peserta pelatihan/workshop/ bintek pertanian	95 orang	
							Jumlah peserta pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	270 orang	
							Jumlah peserta pembinaan kelompok Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	40 orang	
							Jumlah peserta pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT)	120 orang	

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyediaan sarana operasional penyuluhan	1 paket	4.982.700
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	84.321,66	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)	16,67 %	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok peternakan yang dibina	13 kelompok	143.554.100
					16,13 %	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peternakan	2 jenis	143.554.100
							Jumlah peserta pelatihan/ bimtek budidaya ternak	60 orang	
							Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan kelompok peternak	40 orang	
						Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100 %	51.301.400
					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah sampel pakan ternak yang teruji	10 sampel	51.301.400	
						Jumlah Sampel Pupuk yang Diuji	10 sampel		
						Jumlah Peserta Bimtek/Pelatihan Pakan Ternak	30 orang		
						Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	50 %	5.147.700
						Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah peserta KIE keamanan peredaran obat hewan ke masyarakat	30 orang	5.147.700
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase penyediaan benih/bibit ternak	100 %	60.547.000					

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
						Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah demplot ternak	1 jenis	60.547.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	100 %	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	25 %	719.375.700
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah jenis prasarana RPH yang tersedia dan terpelihara	2 jenis	719.375.700
							Jumlah jenis sarana operasional RPH yang tersedia	3 jenis	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner	36 %	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0 angka	64.515.000
				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	38,89 %	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah lokasi pelayanan pemeriksaan hewan Qurban	300 lokasi	64.515.000
							Jumlah peserta KIE Zoonosis	118 orang	
				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	100 %	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	60 %	399.844.854
						Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jenis penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kesmavet	8 jenis	31.793.900
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jenis obat - obatan hewan yang tersedia	52 jenis	368.050.954
							Jumlah KIE kesehatan hewan ke masyarakat	115 orang	
							Jumlah Lokasi pelayanan terpadu	19 lokasi	
							Jumlah sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan	3 jenis	

Sasaran			Program			Kegiatan/Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	32 %	22.904.800
						Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta pendampingan unit usaha produk hewan	90 orang	14.843.100
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan yang diujikan	125 sampel	8.061.700
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	50 %	4.797.700
						Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah peserta KIE kesrawan	30 orang	4.797.700
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	35,38 %	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1 rekomendasi	34.903.700
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah laporan pengawasan perizinan peternakan	12 dokumen	34.903.700
							Jumlah peserta pembinaan perizinan peternakan	60 orang	
						Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 rekomendasi	4.388.600
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta pembinaan izin usaha pengecer obat hewan	30 orang	4.388.600

Blitar, 28 Oktober 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR



Ir. RODIYAH
Pembina Utama Muda
NIP 19630610 199203 2 008

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. RODIYAH

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : WALIKOTA BLITAR

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi - (Sasaran)	86,25 (Nilai)
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah - (Sasaran)	84,70 (Nilai)
3	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun - (Sasaran)	198.186,93 (kwintal)
4	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) - (Sasaran)	84322 (kwintal)
5	Terjaganya produksi perikanan budidaya	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun - (Sasaran)	4.698.482 (ekor)
6	Terjaganya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2404.80 (kwintal)
7	Terjaganya produksi perikanan budidaya	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	30.60 (%)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.009.650.737,00	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	729.238.360,00	APBD
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	63.081.500,00	APBD
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	12.000.000,00	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	705.042.895,00	APBD
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	122.642.300,00	APBD
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	660.673.325,00	APBD
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.306.104.487,00	APBD
9	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	492.062.354,00	APBD
10	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	91.487.000,00	APBD
11	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	107.335.800,00	APBD
12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.416.118.700,00	APBD
JUMLAH		17.715.437.458,00	

WALIKOTA BLITAR

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN

D. RODIYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 196306101992032008

LAMPIRAN 4.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Nama OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	84,7	85,56	101,02	Sangat Berhasil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.009.650.737	8.790.072.728	97,56	
2.	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	86,25	86,31	100,07	Sangat Berhasil	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	729.238.360	726.838.860	99,67	
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	63.081.500	63.081.500	100,00	
								Program Pengawasan Keamanan Pangan	12.000.000	12.000.000	100,00	
3.	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	198186,93	245151,00	123,70	Sangat Berhasil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	400.123.125	399.133.025	99,75	
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.586.728.787	3.566.705.170,43	99,44	
								Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	91.487.000	91.487.000	100,00	
								Program Perizinan Usaha Pertanian	68.043.500	67.043.500	98,53	
								Program Penyuluhan Pertanian	1.416.118.700	1.376.778.534	97,22	
4.	Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	84322,00	104984,48	124,50	Sangat Berhasil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	260.550.200	245.897.900	94,38	
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	719.375.700	715.720.700	99,49	

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	492.062.354	489.535.200	99,49	
								Program Perizinan Usaha Pertanian	39.292.300	39.292.300	100,00	
5.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2404,80	2412,40	100,32	Sangat Berhasil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	705.042.895	704.986.650	99,99	
6.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan hias	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4698482,00	4699324,00	100,02	Sangat Berhasil	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	122.642.300	121.607.200	99,16	
7.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata ((nilai output (Rp/Kg)- Sumbangan input lain (Rp/kg)-Harga bahan baku (Rp/kg))/ Nilai output x 100%)	30,6	79,35	259,31	Sangat Berhasil					

Blitar, 31 Desember 2022
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KOTA BLITAR



Ir. RODIYAH

Pembina Utama Muda

NIP 19630610 199203 2 008